



## BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI BANTEN

SIARAN PERS

### Anggota VI BPK Serahkan LHP LKPD Provinsi Banten TA 2020 kepada DPRD Provinsi Banten dan Wakil Gubernur Banten

**Serang, 24 Mei 2021** – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Banten hari ini menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2020. Penyerahan dilakukan oleh Anggota VI BPK **Prof. Harry Azhar Azis M.A., Ph.D., CSFA, CFrA** kepada Ketua DPRD Provinsi Banten **Andra Soni** dan Wakil Gubernur Banten **H. Andika Hazrumy, S.Sos., M.A.P** dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten, di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten, Serang (24/5). Penyerahan ini disaksikan secara langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Banten **Arman Syifa**, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Banten, Sekretaris Daerah Provinsi Banten, dan Pimpinan Instansi Vertikal di Provinsi Banten.

Pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) merupakan bagian dari tugas konstitusional BPK. Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Banten atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2020, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Banten, maka BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian** atas LKPD Provinsi Banten Tahun 2020. Dengan demikian, Pemerintah Provinsi Banten telah berhasil mendapatkan dan mempertahankan Opini WTP untuk yang **ke-5** kalinya.

“Tanpa mengurangi penghargaan atas keberhasilan yang telah dicapai oleh Pemerintah Provinsi Banten, BPK masih menemukan 12 kelemahan pengendalian intern dan permasalahan terkait ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, yang tidak mempengaruhi secara material terhadap kewajaran Laporan Keuangan Tahun 2020,” ujar Prof. Harry Azhar dalam sambutannya.

Permasalahan tersebut antara lain: (1) Penatausahaan Kas Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2020 belum memadai, yaitu masih ditemukan rekening Bendahara Pengeluaran UPTD pada tiga perangkat daerah dan rekening operasional yang belum ditetapkan melalui keputusan gubernur; (2) Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Belum Memadai, antara lain, Pemerintah Provinsi Banten belum menetapkan status penggunaan BMD tanah dan bangunan gedung dengan perolehan sampai dengan Tahun 2020, pinjam pakai kendaraan dinas belum tertib dan sebanyak 590 bidang tanah belum bersertifikat; (3) Pelaksanaan kerja sama penyimpanan uang daerah Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2020 di Bank Banten belum sepenuhnya sesuai ketentuan. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa perjanjian kerja sama antara Pemerintah Provinsi dan Bank Banten tentang penyimpanan uang daerah kurang memadai untuk pemenuhan hak Pemerintah Provinsi Banten, Bank Banten tidak melaksanakan ketentuan dalam perjanjian kerja sama, sehingga Pemerintah Provinsi Banten tidak dapat mencairkan dana yang dibutuhkan untuk menjalankan aktivitas pemerintahan, salah satunya berupa penundaan transfer Dana Bagi Hasil bulan Februari 2020 ke kabupaten/kota; dan (4) Kelebihan Pembayaran beberapa Pekerjaan Gedung dan Bangunan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Badan Pendapatan Daerah Provinsi akibat volume pekerjaan tidak sesuai kontrak senilai Rp1,16 miliar.

Untuk kedua kalinya dalam penyerahan LHP LKPD Tahun 2020 ini, BPK turut menyerahkan LHP Kinerja atas Efektivitas Peningkatan Ketahanan Pangan pada Aspek Ketersediaan Pangan Tahun



## BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI BANTEN

### SIARAN PERS

2020 dalam kerangka *Long Form Audit Report* (LFAR). Pemeriksaan kinerja ini bertujuan untuk menilai efektivitas kegiatan peningkatan ketahanan pangan pada aspek ketersediaan pangan tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Banten, dan merupakan bagian dari pemeriksaan LKPD yang dilaksanakan dalam upaya memberikan nilai tambah dan manfaat lembaga pemeriksa seperti yang telah disepakati secara internasional dalam INTOSAI (*International Organization of Supreme Audit Institutions*).

Terkait Hasil pemeriksaan BPK atas Kinerja ini, BPK mengapresiasi upaya Pemerintah Provinsi Banten dalam peningkatan ketersediaan pangan, melalui Dinas Pertanian Provinsi Banten yang telah melaksanakan kegiatan terkait fasilitasi, penyebaran, pemanfaatan dan penerapan hasil penelitian pangan diantaranya melalui kegiatan demonstrasi *farming* dan demonstrasi *plot* untuk tanaman padi dan jagung, yang bertujuan untuk pengenalan teknologi baru terhadap masyarakat petani. Selain itu Dinas Pertanian telah melaksanakan tahapan kegiatan sesuai Juknis dan Juklak Bantuan Benih Pemerintah Tahun 2020 untuk memastikan kesesuaian bantuan benih dengan kebutuhan dari kelompok tani di kabupaten/kota.

Namun demikian, BPK masih menemukan beberapa permasalahan yang jika tidak segera diselesaikan dapat mempengaruhi efektivitas peningkatan ketahanan pangan pada aspek ketersediaan pangan, diantaranya Pemerintah provinsi Banten belum memiliki rencana peningkatan ketersediaan pangan yang memadai, dalam hal perlindungan dan pengoptimalan lahan pertanian; Pemerintah Provinsi Banten belum mempunyai sumber daya memadai untuk melaksanakan peningkatan ketahanan pangan, seperti SDM dan sistem informasi; dan Pemerintah Provinsi Banten belum melaksanakan upaya peningkatan ketersediaan pangan secara memadai, seperti belum melaksanakan proses dan tahapan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sesuai dengan ketentuan, termasuk berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota terkait hal tersebut, serta belum melaksanakan pengoptimalan lahan pertanian melalui ekstensifikasi dan intensifikasi.

Masih dalam sambutannya, Prof. Harry Azhar memaparkan tentang perkembangan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Tahun 2005-2020 dengan tingkat penyelesaian 79,35% yaitu sebanyak 6.985 rekomendasi senilai Rp370,87 miliar dan USD 0.86 ribu dari total 8.803 rekomendasi senilai Rp776,01 miliar dan USD 450.36 ribu. Sedangkan untuk kerugian daerah per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp526,82 miliar telah ditetapkan senilai Rp101,47 miliar dan dari yang telah ditetapkan tersebut telah disetor sebesar Rp93,71 miliar serta dihapuskan senilai Rp0,73 miliar.

Prof. Harry Azhar berharap Pimpinan dan Anggota DPRD dapat ikut memantau penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan sesuai kewenangannya. "Apabila pimpinan ataupun anggota DPRD memerlukan penjelasan lebih lanjut atas substansi LHP, dapat mengusulkan pertemuan konsultasi dengan BPK Perwakilan Provinsi Banten untuk mendapat penjelasan lebih lanjut," ungkap Prof. Harry Azhar.

Mengakhiri sambutannya, Prof. Harry Azhar mengucapkan terima kasih kepada DPRD Provinsi Banten dan Gubernur Banten beserta jajaran atas kerja samanya selama proses pemeriksaan dan berharap agar hasil pemeriksaan tersebut dapat memberi dorongan dan motivasi untuk terus memperbaiki pengelolaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

**BPK Perwakilan Provinsi Banten**

*Informasi Lebih Lanjut dapat menghubungi:*

**Sub Bagian Humas dan TU Kepala Perwakilan**